

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karawang, 31 Desember 2018
Kepala Balai ,



Ir. Tri Susetyo, M.M
NIP. 195903111983031022

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1. Koreksi Lain-lain
 - E.4.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.3. Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5. Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karawang, 31 Desember 2018

Kepala Balai ,



Ir. Tri Susetyo, M.M

NIP. 195903111983031022

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp366.977.416,00 atau mencapai 443,97% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp82.658.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp15.401.456.576,00 atau mencapai 95,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp16.068.446.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp174.967.396.846,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp69.392.920,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp174.892.425.680,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.578.246,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp174.967.396.846,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp366.977.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.663.103.052,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-16.296.126.052,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-1.176.081,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16.297.302.133,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp46.937.580.330,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-16.297.302.133,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp126.552.084.089,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.775.034.560,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp174.967.396.846,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	82.658.000,00	366.977.416,00	443,97	285.940.800,00
Jumlah Pendapatan		82.658.000,00	366.977.416,00	443,97	285.940.800,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.964.268.000,00	5.452.348.000,00	91,42	5.564.425.573,00
Belanja Barang	B.4.	8.761.232.000,00	8.607.817.781,00	98,25	7.203.486.637,00
Belanja Modal	B.5.	1.342.946.000,00	1.341.290.795,00	99,88	3.357.909.905,00
Jumlah Belanja		16.068.446.000,00	15.401.456.576,00	95,85	16.125.822.115,00

II. NERACA

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	69.392.920,00	121.332.200,00
Jumlah Aset Lancar		69.392.920,00	121.332.200,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	146.844.994.000,00	17.466.992.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	26.160.532.533,00	25.465.055.629,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	13.229.993.500,00	18.292.967.599,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	793.298.500,00	702.025.700,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	27.425.550,00	2.596.936.450,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6.	-11.439.293.883,00	-12.954.240.824,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6.	-664.631.959,00	-4.682.143.871,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6.	-59.892.561,00	-71.344.553,00
Jumlah Aset Tetap		174.892.425.680,00	46.816.248.130,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	498.594.991,00	68.580.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.2.	-493.016.745,00	-68.580.000,00
Jumlah Aset Lainnya		5.578.246,00	0,00
Jumlah Aset		174.967.396.846,00	46.937.580.330,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	174.967.396.846,00	46.937.580.330,00
Jumlah Ekuitas		174.967.396.846,00	46.937.580.330,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		174.967.396.846,00	46.937.580.330,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	366.977.000,00	285.940.800,00
JUMLAH PENDAPATAN		366.977.000,00	285.940.800,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.452.348.000,00	5.564.425.573,00
Beban Persediaan	D.3.	731.185.490,00	528.874.285,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.924.803.514,00	2.884.510.083,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	522.099.506,00	888.318.472,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	4.502.342.054,00	2.862.290.292,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.530.324.488,00	2.391.123.114,00
JUMLAH BEBAN		16.663.103.052,00	15.119.541.819,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-16.296.126.052,00	-14.833.601.019,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	45.220.466,00	73.602.490,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	46.396.547,00	72.649.300,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-1.176.081,00	953.190,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-16.297.302.133,00	-14.832.647.829,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	46.937.580.330,00	35.216.880.564,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-16.297.302.133,00	-14.832.647.829,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1.	0,00	254.188,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2.	910.384.281,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4.	125.641.699.808,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	17.775.034.560,00	26.553.093.407,00
EKUITAS AKHIR		174.967.396.846,00	46.937.580.330,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Subsektor tanaman pangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan pertanian regional dan nasional. Kontribusi subsektor tanaman pangan tidak hanya terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup besar PDB, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta perekonomian regional dan nasional. Selama krisis ekonomi subsektor ini telah memperlihatkan ketangguhannya dengan tetap tumbuh positif, sementara sector lainnya mengalami pertumbuhan negative. Subsektor ini menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.

Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim merupakan risiko yang selalu timbul dan harus diperhitungkan dalam setiap usaha tani. Antisipasi yang tidak memadai terhadap OPT dan perubahan iklim akan mengakibatkan eksplosif OPT, kekeringan dan banjir yang sangat merugikan dan menjadi kendala program pembangunan pertanian. Dalam sistem usaha agribisnis dan ketahanan pangan, perlindungan tanaman merupakan bagian yang penting baik dalam kegiatan budidaya (on farm) maupun di luar kegiatan budidaya (of farm). Oleh sebab itu perlindungan tanaman menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam kegiatan usaha tani.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman, kegiatan perlindungan tanaman dilaksanakan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). PHT harus menjawai setiap usaha budidaya tanaman dan pengamanan hasil tanaman, bahkan dalam era perdagangan bebas ini penerapan Sistem PHT menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan jaminan proses produksi yang ramah lingkungan. Peramalan OPT adalah kegiatan yang diarahkan untuk mendeteksi/memprediksi populasi/serangan OPT, kemungkinan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan dalam ruang dan waktu tertentu. Peramalan pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan OPT terutama dalam pengambilan keputusan pengendalian yang sesuai dengan prinsip dan penerapan PHT.

Sebagai arah kebijakan dalam pencapaian sasaran, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Jatisari dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura

- b. Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT
- c. Pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT
- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem PHT
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT
- h. Pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura
- i. Pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat Nasional
- j. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BBPOPT mempunyai Visi, yaitu “Menjadi Lembaga Terpercaya dan Pusat Pengembangan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Diakui Dunia Internasional”. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian visi, BBPOPT didukung atau memiliki misi-misi sebagai berikut :

- Mengembangkan BBPOPT yang Profesional, Efektif dan Efisien;
- Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas di Bidang Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT;
- Menciptakan Model Peramalan OPT yang Tepat dan Akurat;
- Menciptakan Metode Pengamatan OPT yang Tepat dan Akurat;
- Merakit dan Mengembangkan Teknologi Pengendalian Tepat Guna yang Efektif, Efisien dan Aman;
- Menerapkan dan Mengembangkan Teknologi PHT Spesifik Lokasi;
- Meningkatkan Pelayanan dan Diseminasi Informasi Pengamatan, Peramalan dan Teknologi Pengendalian OPT.

Untuk pelaksanaan operasional dalam mencapai visi dan misi, BBPOPT memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik petugas, petani maupun masyarakat lainnya di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (perlindungan tanaman) dalam rangka pemahaman, pelaksanaan, pemasyarakatan dan pelebagaan konsepsi PHT;
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlindungan tanaman;
- Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan

hortikultura, serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan perlindungan tanaman antar berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah;

- Memberikan dukungan teknologi di bidang pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT) kepada pihak pengambil kebijakan dalam pelaksanaan P3OPT dan rujukan proteksi;
- Berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan tanaman pangan khususnya pencapaian dan pertumbuhan produksi pangan nasional khususnya padi, jagung, kedelai dan ubi kayu pada tahun 2015 - 2019

b. Sasaran

- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik petugas, petani maupun masyarakat lainnya di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (perlindungan tanaman) dalam rangka pemahaman, pelaksanaan, pemasyarakatan dan pelebagaan konsepsi PHT;
- Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlindungan tanaman;
- Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan perlindungan tanaman antar berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Terwujudnya dukungan teknologi di bidang pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT) kepada pihak pengambil kebijakan dalam pelaksanaan P3OPT dan rujukan proteksi;
- Terwujudnya peran aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan tanaman pangan khususnya pencapaian dan pertumbuhan produksi pangan nasional khususnya padi, jagung, kedelai dan ubi kayu pada tahun 2015 - 2019

Dalam kebijakan Kementerian Pertanian, Kepala BBPOPT ditunjuk sebagai penanggung jawab dan membina Provinsi Riau dalam rangka kegiatan Upsus Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) guna meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Selain itu, beberapa petugas telah ditunjuk sebagai pendamping di tingkat lapangan khususnya untuk Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis dan Kepulauan Meranti, hal ini sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 80/Hk.310/C/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Tim Pendukung Kelompok Kerja Upsus Peningkatan Produksi Pajale melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan supervisi/monitoring dan pendampingan satuan kerja perangkat daerah pelaksanaan program
- b. Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22.158.000,00	22.158.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	60.500.000,00	60.500.000,00
Jumlah Pendapatan	82.658.000,00	82.658.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.620.974.000,00	5.620.974.000,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	343.294.000,00	343.294.000,00
Belanja Barang Operasional	1.113.960.000,00	1.152.468.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.832.826.000,00	1.155.768.000,00
Belanja Barang Persediaan	853.891.000,00	773.891.000,00
Belanja Jasa	678.600.000,00	642.446.000,00
Belanja Pemeliharaan	367.472.000,00	432.168.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.408.483.000,00	4.604.491.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.000.000,00	411.423.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	613.846.000,00	660.966.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	336.000.000,00	268.057.000,00
Belanja Modal Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00
Jumlah Belanja	15.362.846.000,00	16.068.446.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp366.977.416,00 atau mencapai 443,97% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp82.658.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22.158.000,00	366.977.000,00	1.656,18
Pendapatan Lain-lain	0,00	416,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	60.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	82.658.000,00	366.977.416,00	443,97

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 28,34% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	366.977.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda	0,00	10.225.800,00	- 100,00
Pendapatan Lain-lain	416,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	275.715.000,00	- 100,00
Jumlah	366.977.416,00	285.940.800,00	28,34

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp15.401.456.576,00 atau 95,85% dari anggaran belanja sebesar Rp16.068.446.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.964.268.000,00	5.461.136.004,00	91,56
Belanja Barang	8.761.232.000,00	8.607.817.781,00	98,25
Belanja Modal	1.342.946.000,00	1.341.290.795,00	99,88
Total Belanja Kotor	16.068.446.000,00	15.410.244.580,00	95,90
Pengembalian Belanja		-8.788.004,00	0.00
Total Belanja	16.068.446.000,00	15.401.456.576,00	95,85

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -4,49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: Pengurangan pagu anggaran, sisa anggaran dana transito, gaji pegawai dan tunjangan.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	5.452.348.000,00	5.564.425.573,00	-2,01
Belanja Barang	8.607.817.781,00	7.203.486.637,00	19,50
Belanja Modal	1.341.290.795,00	3.357.909.905,00	- 60,06
Total Belanja	15.401.456.576,00	16.125.822.115,00	-4,49

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.452.348.000,00 dan Rp5.564.425.573,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -2,01% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh: sisa dana transito, gaji dan tunjangan karena pensiun dan mutasi pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.461.136.004,00	5.568.500.921,00	-1,93
Jumlah Belanja Kotor	5.461.136.004,00	5.568.500.921,00	-1,93
Pengembalian Belanja Pegawai	-8.788.004,00	-4.075.348,00	115,64
Jumlah Belanja	5.452.348.000,00	5.564.425.573,00	-2,01

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.607.817.781,00 dan Rp7.203.486.637,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 19,50% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh: penambahan anggaran pengamanan produksi, upsur Pajak sebesar, renovasi gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.147.042.101,00	1.019.469.094,00	12,51
Belanja Barang Non Operasional	1.135.973.190,00	1.397.205.725,00	-18,70
Belanja Barang Persediaan	771.598.960,00	1.114.009.262,00	-30,74
Belanja Jasa	641.788.223,00	467.835.264,00	37,18
Belanja Pemeliharaan	409.073.253,00	342.677.000,00	19,38
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.502.342.054,00	2.862.290.292,00	57,30
Jumlah Belanja Kotor	8.607.817.781,00	7.203.486.637,00	19,50
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	8.607.817.781,00	7.203.486.637,00	19,50

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.341.290.795,00 dan Rp3.357.909.905,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar -60,06% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Pembelian peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.779.695,00	3.337.213.775,00	-87,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.965.500,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.056.500,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	2.489.100,00	20.696.130,00	-87,97
Jumlah Belanja Kotor	1.341.290.795,00	3.357.909.905,00	-60,06
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.341.290.795,00	3.357.909.905,00	-60,06

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp409.779.695,00 dan Rp3.337.213.775,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami penurunan sebesar -87,72% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembelian peralatan dan mesin pembakar limbah/residu pestisida.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.779.695,00	3.337.213.775,00	-87,72
Jumlah Belanja Kotor	409.779.695,00	3.337.213.775,00	-87,72
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	409.779.695,00	3.337.213.775,00	-87,72

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp660.965.500,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh renovasi gedung keamanan/pos satpam dan pembangunan rumah kompos.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.965.500,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	660.965.500,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	660.965.500,00	0,00	0,00

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp268.056.500,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembangunan/pembuatan jaringan irigasi untuk pengairan lahan sawah kajian atau percobaan.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.056.500,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	268.056.500,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	268.056.500,00	0,00	0,00

B.5.4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.489.100,00 dan Rp20.696.130,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 mengalami penurunan sebesar -87,97% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembelian bahan literatur/bahan publikasi.

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	2.489.100,00	20.696.130,00	-87,97

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	2.489.100,00	20.696.130,00	-87,97
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.489.100,00	20.696.130,00	-87,97

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp69.392.920,00 dan Rp121.332.200,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	68.785.470,00	119.498.500,00
Bahan untuk Pemeliharaan	28.000,00	277.000,00
Suku Cadang	480.000,00	960.000,00
Bahan Baku	99.450,00	596.700,00
Jumlah	69.392.920,00	121.332.200,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp146.844.994.000,00 dan Rp17.466.992.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	17.466.992.000,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	129.378.002.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	146.844.994.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa revaluasi aset tanah tahun 2018.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah

masing-masing sebesar Rp26.160.532.533,00 dan Rp25.465.055.629,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	25.465.055.629,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	409.779.695,00
Transfer Masuk	693.272.200,00
Reklasifikasi Masuk	22.440.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	32.941.000,00
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-32.941.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-430.014.991,00
Saldo per 31 Desember 2018	26.160.532.533,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-11.439.293.883,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	14.721.238.650,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: penyusutan dan lelang peralatan dan mesin.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.229.993.500,00 dan Rp18.292.967.599,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	18.292.967.599,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	38.210.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	513.115.500,00
Pengembangan Nilai Aset	87.790.000,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	2.572.000.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-3.598.556.258,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-4.675.533.341,00
Saldo per 31 Desember 2018	13.229.993.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-664.631.959,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	12.565.361.541,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa renovasi gudang dan pembangunan rumah kompos.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp793.298.500,00 dan Rp702.025.700,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	702.025.700,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	268.056.500,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-137.745.934,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-16.597.766,00
Reklasifikasi Keluar	-22.440.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	793.298.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-59.892.561,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	733.405.939,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa pembuatan jaringan irigasi untuk pengairan sawah.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.425.550,00 dan Rp2.596.936.450,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.596.936.450,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	2.489.100,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-2.572.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	27.425.550,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	27.425.550,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa pembelian peralatan laboratorium dan reklasifikasi gedung dan bangunan.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-12.163.818.403,00 dan Rp-17.707.729.248,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	26.160.532.533,00	-11.439.293.883,00	14.721.238.650,00
2.	Gedung dan Bangunan	13.229.993.500,00	-664.631.959,00	12.565.361.541,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	793.298.500,00	-59.892.561,00	733.405.939,00
4.	Aset Tetap Lainnya	27.425.550,00	0,00	27.425.550,00
Akumulasi Penyusutan		40.211.250.083,00	-12.163.818.403,00	28.047.431.680,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp498.594.991,00 dan Rp68.580.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-493.016.745,00 dan Rp-68.580.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	498.594.991,00	-493.016.745,00	5.578.246,00
Akumulasi Penyusutan		498.594.991,00	-493.016.745,00	5.578.246,00

C.5. EKUITAS

C.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp174.967.396.846,00 dan Rp46.937.580.330,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp366.977.000,00 dan Rp285.940.800,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	10.225.800,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0,00	259.165.000,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	349.611.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.366.000,00	16.550.000,00	4,93
Jumlah	366.977.000,00	285.940.800,00	28,34

Pendapatan tahun 2018 di hasilkan dari pendapatan penjualan hasil pertanian lahan percobaan/kajian fungsional, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan dari sewa rumah dinas, ruang pertemuan dan asrama.

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.452.348.000,00 dan Rp5.452.348.000,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.838.110.480,00	4.001.352.900,00	-4,08
Beban Pembulatan Gaji PNS	64.259,00	54.329,00	18,28
Beban Tunj. Anak PNS	86.664.821,00	83.447.234,00	3,86

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Tunj. Beras PNS	220.591.320,00	230.874.960,00	-4,45
Beban Tunj. Fungsional PNS	267.150.000,00	230.970.000,00	15,66
Beban Tunj. PPh PNS	8.241.072,00	7.007.210,00	17,61
Beban Tunj. Struktural PNS	119.865.000,00	108.915.000,00	10,05
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	319.317.048,00	309.599.940,00	3,14
Beban Tunjangan Umum PNS	90.490.000,00	96.040.000,00	-5,78
Beban Uang Makan PNS	501.854.000,00	496.164.000,00	1,15
Jumlah	5.452.348.000,00	5.564.425.573,00	-2,01

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp731.185.490,00 dan Rp528.874.285,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	139.454.500,00	86.453.400,00	61,31
Beban Persediaan konsumsi	475.252.490,00	393.717.885,00	20,71
Beban persediaan lainnya	116.478.500,00	48.703.000,00	139,16
Jumlah	731.185.490,00	528.874.285,00	38,25

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.924.803.514,00 dan Rp2.884.510.083,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	879.604.290,00	1.099.785.725,00	-20,02
Beban Barang Non Operasional Lainnya	64.308.900,00	132.640.000,00	-51,52
Beban Barang Operasional Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	142.080.000,00	92.950.000,00	52,86
Beban Honor Output Kegiatan	192.060.000,00	164.780.000,00	16,56
Beban Jasa Lainnya	0,00	23.286.088,00	-100,00
Beban Jasa Profesi	161.850.000,00	142.780.000,00	13,36
Beban Keperluan Perkantoran	946.440.101,00	918.933.744,00	2,99
Beban Langganan Listrik	409.638.237,00	271.292.941,00	50,99
Beban Langganan Telepon	13.099.986,00	4.176.235,00	213,68
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.522.000,00	7.585.350,00	12,35
Beban Sewa	57.200.000,00	26.300.000,00	117,49
Jumlah	2.924.803.514,00	2.884.510.083,00	1,40

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp522.099.506,00 dan Rp888.318.472,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.850.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.785.750,00	21.579.500,00	-82,46
Beban Persediaan suku cadang	496.463.756,00	866.738.972,00	-42,72
Jumlah	522.099.506,00	888.318.472,00	-41,23

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.502.342.054,00 dan Rp2.862.290.292,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	4.035.878.574,00	2.330.768.230,00	73,16
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	105.000.000,00	115.830.000,00	-9,35
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	361.463.480,00	415.692.062,00	-13,05
Jumlah	4.502.342.054,00	2.862.290.292,00	57,30

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.530.324.488,00 dan Rp2.391.123.114,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	658.021.429,00	703.317.550,00	-6,44
Beban Penyusutan Irigasi	7.681.311,00	9.307.394,00	-17,47
Beban Penyusutan Jaringan	7.458.750,00	7.458.750,00	0,00

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.025.811,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.855.137.187,00	1.671.039.420,00	11,02
Jumlah	2.530.324.488,00	2.391.123.114,00	5,82

D.8. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-46.396.547,00	-72.649.300,00	-36,14
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	45.220.050,00	73.602.490,00	-38,56
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	416,00	0,00	0,00
Jumlah	-1.176.081,00	953.190,00	-223,38

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp46.937.580.330,00 dan Rp35.216.880.564,00.

E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-16.297.302.133,00 dan Rp-14.832.647.829,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp126.552.084.089,00 dan Rp254.188,00.

E.4.1. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp254.188,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp910.384.281,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Irigasi	9.994.287,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.472.389.994,00
Aset Tetap Renovasi	-2.572.000.000,00

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Irigasi	-22.440.000,00
Peralatan dan Mesin	22.440.000,00
Jumlah	910.384.281,00

E.4.3. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.4. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp125.641.699.808,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	129.378.002.000,00
Gedung dan Bangunan	-8.274.089.599,00
Irigasi	-154.343.700,00
Jumlah	125.641.699.808,00

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17.775.034.560,00 dan Rp26.553.093.407,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.401.456.576,00
Diterima dari Entitas Lain	-366.977.416,00
Transfer Masuk	2.740.555.400,00
Jumlah	17.775.034.560,00

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-366.977.416,00 sedangkan DKEL sebesar Rp15.401.456.576,00.

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.740.555.400,00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.740.555.400,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin		693.272.200,00
2.	Gedung dan Bangunan		2.572.000.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-524.716.800,00
Jumlah			2.740.555.400,00

E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp174.967.396.846,00 dan Rp46.937.580.330,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Kejadian-kejadian penting selama periode dari 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adanya revisi DIPA satker BBPOPT Tahun Anggaran 2018 ada penambahan Anggaran dari Ditjen Hortikultura untuk pengelolaan Laboratorium dan Keperluan kantor.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Karawang Nomor : 151/KU.010/C.8/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Karawang, yaitu :

Pejabat Pembuat Komitmen : Retno Ayu Prasetyaningtyas, S.P

Pejabat Penandatangan/Penguji : Ir. Mustaghfirin

Bendahara Pengeluaran : Oya Kusmaya

Bendahara Penerimaan : Fitrah Rahmatullah, SE.